



Komunikasi Partisipatif Dalam Sosialisasi Peraturan Daerah Pada Masyarakat Kelurahan Tamansari

Wiastuti¹; Kornelia Johana Dacosta²

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Dian Nusantara, Jl. Tanjung Duren Barat II No. 1, Grogol, Jakarta.

Email: 211211051@mahasiswa.undira.ac.id¹; kornelia.johana@undira.ac.id²

Article Info

Submitted:
12 Mei 2026

Accepted:
9 Juli 2026

Published:
10 Juli 2026

DOI:



Vol 14 (No.1), 2026

Hal 145 - 158

ABSTRACT

Regional Regulation Socialization (Sosperda) is an important public communication strategy implemented by the Regional House of Representatives (DPRD) to improve citizens' understanding of local regulations. However, communication barriers often reduce the effectiveness of policy dissemination in urban communities. This study aims to analyze the communication patterns carried out by DPRD DKI Jakarta in the implementation of Sosperda in Tamansari Village, West Jakarta. The research focuses on understanding how messages are delivered and what obstacles occur during the communication process. A descriptive qualitative method was employed through in-depth interviews, observation, and documentation involving five key informants. Data were analyzed using NVivo 12 software to identify major communication themes. The findings indicate that the communication pattern tends to be semi-participatory, where one-way communication remains dominant but has developed into two-way communication through dialogue and question-and-answer sessions. The main obstacles include the use of formal legal terminology, limited discussion time, and the community's low understanding of the substance of regional regulations. These findings confirm that the effectiveness of Sosperda is strongly influenced by the communicator's ability to simplify policy language and create contextual dialogue spaces that are relevant to community needs.

Keywords: *Participatory Communication; Sosperda; DPRD DKI Jakarta*

ABSTRAK

Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) merupakan salah satu strategi komunikasi publik yang dilakukan DPRD untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan daerah. Namun, efektivitas penyampaian informasi masih menghadapi berbagai hambatan komunikasi di masyarakat perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola komunikasi yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta dalam pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) di Kelurahan Tamansari, Jakarta Barat. Fokus penelitian adalah memahami bagaimana pesan disampaikan dan hambatan yang terjadi selama proses komunikasi berlangsung. Metode yang digunakan adalah

kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan utama. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo 12 untuk memetakan tema-tema komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang diterapkan cenderung bersifat semi-partisipatif, di mana komunikasi satu arah masih dominan, tetapi telah berkembang menuju komunikasi dua arah melalui sesi dialog dan tanya jawab. Hambatan utama yang ditemukan meliputi penggunaan istilah hukum yang formal, keterbatasan waktu diskusi, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi Peraturan Daerah. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas Sosperda dipengaruhi oleh kemampuan komunikator dalam menyederhanakan bahasa kebijakan dan membangun ruang dialog yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Komunikasi Partisipatif; Sosperda; DPRD DKI Jakarta

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi strategis dalam pembentukan peraturan daerah yang berdampak langsung pada tatanan kehidupan masyarakat ibu kota. Salah satu instrumen penting dalam menjalankan fungsi legislasi ini adalah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda). Kegiatan ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan jembatan komunikasi antara regulator dan konstituen untuk memastikan bahwa setiap produk hukum dipahami dan diterima dengan baik. Namun, dalam praktiknya, penyampaian informasi hukum seringkali menghadapi tantangan kompleks, terutama dalam menjangkau masyarakat di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan latar belakang sosial yang heterogen.

DPRD Provinsi DKI Jakarta secara rutin menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) sebagai bagian dari fungsi legislasi dan komunikasi publik kepada masyarakat. Pelaksanaan Sosperda dilakukan oleh anggota dewan di berbagai wilayah administrasi Jakarta melalui forum tatap muka yang melibatkan unsur kelurahan, RT/RW, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Dengan jumlah 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024–2029, intensitas kegiatan sosialisasi relatif tinggi dan tersebar di berbagai daerah pemilihan. Namun, tingginya frekuensi kegiatan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi Peraturan Daerah.

Berdasarkan observasi awal peneliti pada pelaksanaan Sosperda di Kelurahan Tamansari, tingkat kehadiran masyarakat rata-rata hanya berkisar 40–60 peserta aktif per kegiatan dari undangan warga yang disebarkan melalui pengurus lingkungan. Dari hasil wawancara pendahuluan dengan Ketua RW dan perwakilan warga, sekitar lebih dari separuh peserta ($\pm 60\%$) menyatakan hanya memahami Sosperda sebagai kegiatan penyampaian informasi umum, namun belum memahami secara mendalam isi pasal, hak, kewajiban, maupun implikasi hukum dari Peraturan Daerah yang disosialisasikan. Sementara itu, hanya sekitar 30–40% peserta yang aktif berpartisipasi dalam sesi diskusi atau tanya jawab.

Temuan awal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara intensitas sosialisasi kebijakan dan kualitas pemahaman masyarakat terhadap Perda. Rendahnya partisipasi dialogis, penggunaan istilah hukum yang formal, serta keterbatasan durasi diskusi menyebabkan masyarakat cenderung menjadi penerima informasi pasif. Kondisi

ini memperkuat urgensi penelitian mengenai pola komunikasi DPRD dalam pelaksanaan Sosperda, khususnya untuk memahami apakah pola komunikasi yang digunakan sudah mampu membangun komunikasi publik yang efektif, partisipatif, dan mudah dipahami masyarakat urban seperti di Kelurahan Tamansari.

Kelurahan Tamansari di Jakarta Barat menjadi lokus penelitian yang signifikan karena karakteristik demografinya yang unik sebagai kawasan pusat aktivitas ekonomi sekaligus pemukiman padat. Fenomena yang muncul di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara intensitas kegiatan sosialisasi dengan tingkat pemahaman mendalam masyarakat terhadap substansi Perda yang disampaikan. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji komunikasi publik instansi pemerintah, namun masih sedikit yang secara spesifik membedah pola komunikasi interpersonal dan kelompok yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam konteks tatap muka di wilayah akar rumput seperti Tamansari. Kesenjangan informasi ini berisiko menghambat efektivitas implementasi peraturan di tingkat lokal.

Evaluasi terhadap studi-studi sebelumnya mengungkapkan bahwa sosialisasi kebijakan seringkali terjebak pada pola komunikasi searah yang bersifat instruktif. Penelitian ini berupaya memberikan perspektif baru dengan menganalisis bagaimana dinamika interaksi terjadi saat anggota dewan turun langsung ke masyarakat. Melalui penggunaan paradigma kualitatif dan alat bantu analisis NVivo 12, penelitian ini bertujuan untuk memetakan secara visual dan substantif pola-pola yang terbentuk, baik itu pola sirkular, linear, maupun pola komunikasi bintang, guna menemukan formula komunikasi yang paling efektif bagi masyarakat urban.

Penelitian terdahulu mengenai komunikasi kebijakan publik umumnya berfokus pada efektivitas penyampaian informasi oleh lembaga pemerintah atau humas pemerintahan. Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis pola komunikasi anggota legislatif daerah dalam forum tatap muka Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) masih relatif terbatas, khususnya pada masyarakat urban dengan tingkat heterogenitas tinggi seperti Kelurahan Tamansari. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam terhadap dinamika komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, serta komunikasi partisipatif dalam pelaksanaan Sosperda. Penelitian ini menawarkan novelty melalui integrasi analisis pola komunikasi berbasis teori Joseph A. Devito dengan

visualisasi data kualitatif menggunakan NVivo 12 untuk memetakan pola komunikasi secara lebih komprehensif.

Penelitian terdahulu mengenai komunikasi kebijakan publik umumnya berfokus pada efektivitas penyampaian informasi oleh lembaga pemerintah atau humas pemerintahan. Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis pola komunikasi anggota legislatif daerah dalam forum tatap muka Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) masih relatif terbatas, khususnya pada masyarakat urban dengan tingkat heterogenitas tinggi seperti Kelurahan Tamansari. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam terhadap dinamika komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, serta komunikasi partisipatif dalam pelaksanaan Sosperda. Penelitian ini menawarkan novelty melalui integrasi analisis pola komunikasi berbasis teori Joseph A. Devito dengan visualisasi data kualitatif menggunakan NVivo 12 untuk memetakan pola komunikasi secara lebih komprehensif.

Pentingnya kajian ini juga didasari oleh kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas publik. Pola komunikasi yang efektif seharusnya mampu menciptakan ruang dialog yang partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi pendengar pasif tetapi juga pemberi masukan bagi penyempurnaan kebijakan di masa depan. Analisis terhadap gangguan atau hambatan komunikasi (noise) yang sering muncul dalam Sosperda di Kelurahan Tamansari akan menjadi bagian integral dari diskusi ini untuk memahami faktor-faktor penghambat keberhasilan penyampaian pesan hukum.

Sebagai solusi, artikel ini memaparkan hasil analisis data dan diskusi logis yang menghubungkan temuan lapangan dengan teori komunikasi sosiopsikologis dan sosiokultural. Dengan mengidentifikasi pola komunikasi yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi DPRD DKI Jakarta dalam merancang strategi sosialisasi yang lebih transformatif dan tepat sasaran. Hal ini krusial untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat dan memperkuat legitimasi produk hukum daerah di mata warga Jakarta Barat, khususnya di Kelurahan Tamansari.

Tabel 1. Penelitian terdahulu yang relevan

Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil
Sirajul Rahman & Alif Fajar	Komunikasi Humas DPRD	Komunikasi dua arah terjadi namun efektivitas belum optimal

Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil
Laduni (2022)		
Ardita Siwantari (2021)	Sosialisasi Raperda	Tatap muka meningkatkan pemahaman masyarakat
Penelitian ini	Pola komunikasi Sosperda	Menemukan model komunikasi semi-partisipatif berbasis NVivo
Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil

Sumber: Olahan peneliti

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan mendasar pada penelitian ini, yaitu penggunaan pendekatan komunikasi publik, komunikasi partisipatif, dan analisis perangkat lunak NVivo 12 untuk melihat relasi antartema komunikasi secara lebih sistematis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivisme untuk menganalisis pola komunikasi DPRD DKI Jakarta dalam pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) pada masyarakat Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai proses komunikasi, interaksi, serta makna yang dibangun oleh para aktor komunikasi dalam kegiatan Sosperda.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Tamansari selama periode November 2024 hingga Februari 2025, yang mencakup tahap observasi awal, pengumpulan data lapangan, analisis data, hingga penarikan kesimpulan.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan langsung, pengalaman, dan pemahaman terhadap pelaksanaan Sosperda. Penelitian ini melibatkan lima informan utama, yaitu Kepala Bagian Produk Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD DKI Jakarta, satu anggota DPRD DKI Jakarta, Lurah Tamansari, Ketua RW 06, serta satu perwakilan warga RT 02/RW 06 Kelurahan Tamansari. Informan tersebut dipilih untuk merepresentasikan perspektif penyusun kebijakan, pelaksana sosialisasi, fasilitator wilayah, dan masyarakat sebagai penerima pesan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator teori pola komunikasi dan komunikasi partisipatif. Setiap wawancara berlangsung selama 30–60 menit, dilakukan secara tatap muka, direkam dengan persetujuan informan, kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk teks untuk proses analisis.

Analisis data menggunakan model interaktif Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memperkuat analisis data kualitatif, penelitian ini memanfaatkan perangkat lunak NVivo 12 guna melakukan coding, kategorisasi tema, dan visualisasi hubungan antartema komunikasi.

Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan member checking dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi data kepada informan guna memastikan kesesuaian makna. Teknik validasi ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan reliabilitas penelitian sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

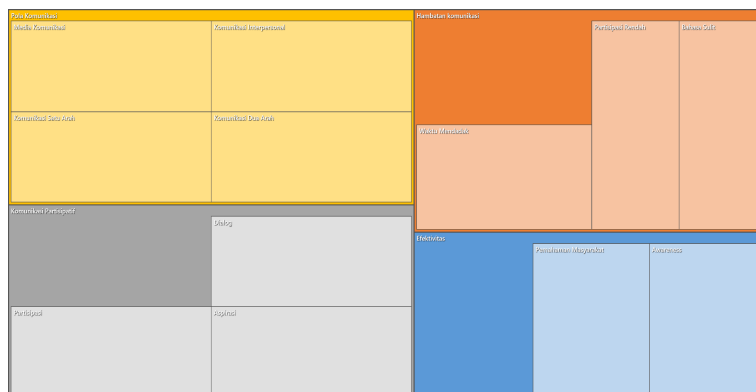
Hasil Penelitian

Analisis data penelitian dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo 12 untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil coding, ditemukan lima tema utama yang mendominasi proses komunikasi dalam kegiatan Sosperda, yaitu komunikasi satu arah (35%), komunikasi dua arah (25%), komunikasi partisipatif (18%), hambatan komunikasi (12%), dan media komunikasi (10%). Hasil visualisasi NVivo menunjukkan bahwa komunikasi satu arah menjadi tema yang paling dominan. Namun, data NVivo juga memperlihatkan kemunculan signifikan tema komunikasi dua arah sebesar 25 persen. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi linear masih dominan, terdapat ruang interaksi yang memungkinkan terjadinya feedback antara DPRD dan masyarakat.

Analisis NVivo juga memperlihatkan bahwa tema hambatan komunikasi memiliki keterkaitan kuat dengan node bahasa formal, istilah hukum, dan keterbatasan waktu. Temuan ini menghasilkan insight akademik bahwa hambatan utama Sosperda bukan sekadar minimnya sosialisasi, melainkan adanya communication gap antara bahasa kebijakan dan bahasa keseharian masyarakat. Secara teoritis, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep semantic noise, yaitu gangguan komunikasi yang muncul ketika penerima pesan gagal memahami makna pesan akibat kompleksitas bahasa. Dengan demikian, hasil analisis NVivo tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi data, tetapi juga mengungkap adanya model komunikasi semi-partisipatif dalam pelaksanaan Sosperda. Model ini menunjukkan bahwa pola komunikasi DPRD berada pada fase transisi dari komunikasi linear menuju komunikasi interaksional dan partisipatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa efektivitas Sosperda sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikator mengurangi semantic noise, menyederhanakan bahasa hukum, dan membangun dialog yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat.

1. Analisis Word Cloud

Hasil word cloud menunjukkan bahwa kata-kata dominan yang paling sering muncul dalam wawancara adalah “masyarakat”, “Sosperda”, “komunikasi”, “DPRD”, “informasi”, “peraturan”, “partisipasi”, “pemahaman”, “kebijakan”, dan “dialog”. Dominasi kata tersebut menunjukkan bahwa fokus utama penelitian berkaitan dengan interaksi komunikasi antara DPRD dan masyarakat dalam proses penyampaian Peraturan Daerah. Kata “masyarakat” menjadi kata yang paling dominan karena seluruh proses komunikasi dalam Sosperda berorientasi pada penyampaian informasi kepada warga. Selain itu, munculnya kata “dialog” dan “partisipasi” menunjukkan bahwa komunikasi dua arah mulai terbentuk dalam kegiatan Sosperda. Namun dominasi kata “informasi” dan “peraturan” memperlihatkan bahwa kegiatan Sosperda masih lebih banyak menekankan penyampaian pesan dibandingkan pemberdayaan masyarakat. Temuan word cloud tersebut memperkuat hasil wawancara bahwa pola komunikasi DPRD masih cenderung formal dan informatif.



Gambar 2. Hierarchy Chart Pola Komunikasi DPRD DKI Jakarta

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti Menggunakan NVivo 12

3. Analisis Matrix Coding Query

Hasil matrix coding query memperlihatkan bahwa hambatan komunikasi menjadi tema yang paling banyak muncul pada kelompok masyarakat dan aparaturnya. Hambatan tersebut terutama berkaitan dengan keterbatasan waktu, penggunaan istilah formal, serta kurangnya tindak lanjut setelah pelaksanaan Sosperda. Data tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikator dalam menerjemahkan isi Perda menjadi bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Selain itu, hasil matrix coding query menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat meningkat ketika materi Sosperda berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti persoalan lingkungan, sampah, ketertiban umum, dan pelayanan publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa relevansi isu kebijakan dengan pengalaman masyarakat mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam komunikasi publik. Berikut salah satu kutipan wawancara yang diperoleh peneliti:

“Kadang masyarakat hadir, tetapi belum tentu memahami isi Perda karena penyampaiannya terlalu formal dan waktunya singkat. Kalau dijelaskan dengan contoh kehidupan sehari-hari biasanya masyarakat lebih mudah mengerti.”

(Informan RT, 48 Tahun)

Kutipan wawancara lainnya menunjukkan pentingnya komunikasi dua arah dalam pelaksanaan Sosperda:

“Kalau ada sesi tanya jawab masyarakat biasanya lebih aktif. Mereka jadi merasa didengar dan lebih berani menyampaikan keluhan mengenai masalah lingkungan atau pelayanan.” (Informan Masyarakat, 39 Tahun)

Selain itu, informan dari DPRD juga menegaskan pentingnya pendekatan interpersonal dalam kegiatan Sosperda:

“Kami berusaha menjelaskan Perda dengan bahasa yang sederhana agar masyarakat lebih memahami. Kalau terlalu formal biasanya masyarakat cepat bosan.” (Informan DPRD, 52 Tahun)

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan tokoh masyarakat dan pengurus lingkungan memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas komunikasi Sosperda. Ketua RT dan RW sering kali menjadi penghubung komunikasi antara DPRD dengan masyarakat. Mereka membantu menginformasikan jadwal kegiatan, mengajak masyarakat untuk hadir, serta menjelaskan kembali isi Perda kepada warga setelah kegiatan selesai. Dengan demikian, komunikasi kebijakan tidak hanya berlangsung pada saat kegiatan Sosperda, tetapi juga berlanjut melalui komunikasi interpersonal di lingkungan masyarakat.

Tabel 2. Hasil Matrix Coding Query NVivo 12

Informan	Komunikasi Satu Arah	Komunikasi Dua Arah	Partisipasi Masyarakat	Hambatan Komunikasi
DPRD DKI Jakarta	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
Sekretariat DPRD	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
Ketua RT/RW	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Masyarakat	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti Menggunakan NVivo 12

Pembahasan

Berdasarkan teori Joseph A. Devito, pola komunikasi yang terbentuk dalam Sosperda terdiri atas komunikasi linear, interaksional, dan transaksional. Komunikasi linear tampak pada penyampaian materi Peraturan Daerah secara formal, sedangkan komunikasi interaksional terlihat melalui adanya umpan balik masyarakat dalam sesi tanya jawab. Pada beberapa kondisi, komunikasi transaksional mulai muncul ketika DPRD dan masyarakat terlibat dalam dialog mengenai persoalan lingkungan dan kebutuhan warga.

Dalam perspektif komunikasi partisipatif Tufte dan Mefalopulos, partisipasi masyarakat masih berada pada tahap konsultatif. Masyarakat telah diberi kesempatan

untuk bertanya dan menyampaikan pendapat, tetapi proses pengambilan keputusan tetap didominasi oleh DPRD. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sosperda belum sepenuhnya menjadi ruang pemberdayaan masyarakat, melainkan masih berfokus pada penyampaian informasi kebijakan.

Hambatan komunikasi yang ditemukan terdiri atas faktor teknis dan faktor sosial. Faktor teknis meliputi keterbatasan waktu, jadwal kegiatan yang mendadak, serta penggunaan bahasa formal yang sulit dipahami. Faktor sosial berkaitan dengan heterogenitas masyarakat perkotaan yang memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman berbeda terhadap kebijakan publik. Hambatan tersebut menyebabkan pesan kebijakan tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sirajul Rahman dan Alif Fajar Laduni yang menunjukkan bahwa komunikasi DPRD bersifat dua arah tetapi masih menghadapi kendala efektivitas. Hasil penelitian juga mendukung temuan Ardita Siwantari mengenai pentingnya pendekatan tatap muka dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan daerah. Perbedaannya, penelitian ini menekankan integrasi komunikasi interpersonal, komunikasi partisipatif, dan komunikasi publik dalam pelaksanaan Sosperda.

Dengan demikian, DPRD DKI Jakarta perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih partisipatif dan kontekstual. Penggunaan bahasa yang sederhana, penguatan pendekatan interpersonal, dan perluasan ruang dialog dapat meningkatkan efektivitas Sosperda. Strategi tersebut penting untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah, dan memperkuat partisipasi warga dalam kehidupan demokrasi lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi DPRD DKI Jakarta dalam pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) di Kelurahan Tamansari cenderung bersifat semi-partisipatif. Komunikasi satu arah masih mendominasi melalui penyampaian materi secara formal, tetapi telah berkembang menuju komunikasi dua arah melalui sesi dialog dan tanya jawab antara anggota DPRD dan masyarakat.

Hasil analisis NVivo 12 memperlihatkan bahwa efektivitas Sosperda dipengaruhi oleh pola penyampaian pesan, relevansi materi dengan kebutuhan masyarakat,

penggunaan bahasa yang komunikatif, serta tingkat partisipasi warga dalam forum diskusi. Hambatan utama yang ditemukan meliputi penggunaan istilah hukum yang terlalu formal, keterbatasan durasi interaksi, dan belum optimalnya ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara mendalam.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep komunikasi kebijakan publik melalui pendekatan hibrida yang mengintegrasikan komunikasi linear, interaksional, dan partisipatif. Secara praktis, DPRD DKI Jakarta perlu memperluas ruang dialog, menyederhanakan bahasa kebijakan, serta memperkuat peran RT/RW dan media komunikasi digital dalam pelaksanaan Sosperta. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji integrasi komunikasi digital dan tatap muka dalam model sosialisasi kebijakan publik di wilayah perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S., Masood, M., Deng, R., & Malviya, S. (2025). Why cynics disengage: The nexus of political cynicism, misinformation, and online political participation. *Asian Journal of Communication*, 35(5).
- Darmawan, I., & Mustofa, I. (2025). A dialogic communication perspective on multi-stakeholder collaboration: A participatory framework for sustainable CSR. *The Indonesian Journal of Communication Studies*, 18(2), 55–71.
- Devito, J. A. (2019). *Human communication: The basic course*. Pearson.
- Effendy, O. U. (2009). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktik*. Remaja Rosdakarya.
- Febriandy, R. K., & Wahyutama. (2024). Kebocoran data PDNS: Analisis strategi komunikasi krisis pemerintah berdasarkan image repair theory. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(2).
- Gregory, A., & Smith, B. G. (2025). AI state of play: The technology, strategic communication practice and academia. *International Journal of Strategic Communication*, 19(2).
- Hossain, M. T., Afroze, S., & Authithi, T. M. (2025). Social media engagement's impact on Gen Z's political and civic participation and activism. *The Indonesian Journal of Communication Studies*, 18(2), 1–17.
- Harahap, M., & Putri, A. (2024). Dialogic communication in public institutions. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 12(2), 88–103.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi*. Kencana.
- Kuai, J. (2025). Navigating the AI hype: Chinese journalists' algorithmic imaginaries and role perceptions in reporting emerging technologies. *Digital Journalism*, 14(2).
- Kusuma, D., & Ananda, F. (2025). Community engagement in public policy communication. *Communication and Society*, 7(1), 12–29.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2018). *Ilmu komunikasi: Suatu pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- Pratama, A., & Nugroho, Y. (2024). Digital public communication and citizen participation in policy dissemination. *Jurnal ASPIKOM*, 9(1), 55–70.

- Qian, S., Chen, K., Meng, J., et al. (2025). Fear in media headlines increases public risk perceptions but decreases preventive behaviors. *Journal of Health Communication*, 30(1–3).
- Rachmawati, F. (2023). Strategi humas pemerintah dalam pengelolaan manajemen isu di era post truth. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 114–127. <https://doi.org/10.21009/COMMUNICOLOGY.031.08>
- Rahman, S., & Laduni, A. F. (2022). Pola komunikasi humas sekretariat DPRD dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Katingan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Rubinelli, S. (2025). Why health institutions must learn from social media influencers: A paradigm shift in health communication. *Journal of Health Communication*, 30(10–12).
- Sari, W. P., & Soegiarto, A. (2021). Strategi komunikasi humas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 188–205. <https://doi.org/10.21009/COMMUNICOLOGY.022.03>
- Siwantari, A. (2021). Pola komunikasi DPRD Kota Makassar dalam mensosialisasikan rancangan peraturan daerah inisiatif (Skripsi). Universitas Fajar.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Santoso, R., & Wijaya, D. (2023). Participatory communication in local governance: Evidence from Indonesian municipalities. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 12(1), 44–58.
- Tufte, T., & Mefalopulos, P. (2009). *Participatory communication: A practical guide*. World Bank.
- Wibowo, H., & Ramadhani, N. (2023). Government communication effectiveness in regional policy socialization. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 21(2), 101–117.